

Memahami Peran Pendidikan Nasional Sebagai Suatu Sistem Yang Terpadu

Shalwa Lutfi Aulia^{1*}

¹Universitas Majalengka, Majalengka, Indonesia

*Corresponding author: shalwalutfiaulia@gmail.com

ABSTRACT

Education in Indonesia has not yet been fully able to meet global needs and challenges. Various improvement efforts have been carried out; however, fundamental issues still hinder the achievement of quality and equitable education. This condition indicates the need for a comprehensive understanding of national education as an integrated system. This study aims to analyze the roles, foundations, challenges, and efforts of national education as an integrated system. The study employs a qualitative descriptive approach with a literature study method. The collected data were analyzed using content analysis techniques. The findings show that National Education, as a system, serves as an education based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, consisting of elements or components that are functionally interconnected, thus forming a unified and interrelated system expected to achieve predetermined goals. Therefore, the integration among these components serves as the foundation for realizing a quality and equitable national education system.

Keywords: National Education, Foundation of National Education, Challenges and Efforts of National Education, Role of Education, Integrated System

ABSTRAK

Pendidikan di Indonesia masih belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dan tantangan global. Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, namun isu-isu mendasar tetap menghambat tercapainya pendidikan yang berkualitas dan merata. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pemahaman terhadap pendidikan nasional sebagai suatu sistem yang terpadu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran, landasan, tantangan dan upaya pendidikan nasional sebagai suatu sistem yang terpadu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis konten (*content analysis*). Hasil kajian menunjukkan bahwa Pendidikan Nasional sebagai suatu sistem berperan sebagai pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya terdiri dari elemen atau unsur-unsur yang saling berkaitan secara fungsional, sehingga terjadinya satu kesatuan yang terpadu dan saling berhubungan, dengan harapan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, keterpaduan antar komponen inilah yang menjadi dasar dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berkualitas dan merata.

Kata Kunci: Pendidikan Nasional, Landasan Pendidikan Nasional, Tantangan dan Upaya Pendidikan Nasional, Peran Pendidikan, Sistem Terpadu

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan yang dapat mengantarkan seseorang kepada kehidupan yang lebih baik. Menurut Suryani (2023) pendidikan bisa menjadi sarana untuk mempersiapkan diri dalam berinteraksi dengan masyarakat, karena kehidupan bukan hanya berkaitan dengan ilmu, tetapi juga mencakup aspek sosial, etika, dan tata krama. Hal ini sesuai dengan undang-undang tentang Sistem Pendidikan No. 20 tahun 2003 yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Rumusan tersebut sejalan dengan fungsi pendidikan yang menekankan bahwa “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Meskipun fungsi dan tujuan pendidikan telah diatur dengan jelas dalam undang-undang, namun dalam pelaksanaannya sistem pendidikan di Indonesia masih sering berjalan secara terpisah antar komponen satu dengan komponen lainnya. Kondisi ini terlihat dari beberapa tantangan yang dihadapi seperti ketidakmerataan akses pendidikan, kualitas pengajaran yang bervariasi, relevansi kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja, serta masalah pendanaan dan kesejahteraan guru (Sukari & Sri Sugiyarti, 2024). Disisi lain, menurut Dahniar (2021) juga menyatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia yang telah di bangun dari dulu sampai sekarang ini, masih belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan global untuk masa yang akan datang. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem pendidikan, isu-isu mendasar masih menghambat tercapainya pendidikan yang berkualitas dan merata. Melihat kondisi tersebut, penting untuk memahami pendidikan sebagai suatu sistem yang terpadu.

Suatu sistem dalam pendidikan memiliki beberapa komponen yang tentunya saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam mencapai tujuan pendidikan. Jika salah satu komponen dalam pendidikan kurang berfungsi dengan baik, maka akan menyebabkan proses dalam sistem tersebut tidak akan berlangsung secara optimal sehingga akan mengganggu pencapaian tujuan tersebut. Oleh karena itu untuk memahami pendidikan nasional secara utuh, pemerintah harus berfokus kepada keseluruhan komponen. Dalam konteks pendidikan nasional, kebijakan kurikulum merdeka belajar merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pendidikan di Indonesia. Menurut Ridlwan & Suparto (2025) kurikulum merdeka memberikan peluang besar bagi terciptanya pembelajaran yang lebih bermakna dan kontekstual, di mana guru dan siswa dapat terlibat dalam proses belajar yang relevan dengan kehidupan nyata. Selain kebijakan kurikulum merdeka, pemerintah juga menerapkan program lain seperti Program Indonesia Pintar (PIP) yang bertujuan dalam pemerataan akses pendidikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kholik et al (2025) di SD Negeri 1 Jejawu menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif pada hasil belajar siswa dan kepuasan orang tua. Berbagai penelitian terdahulu telah menelaah terkait bagaimana kebijakan pendidikan di Indonesia, namun umumnya masih berfokus pada salah satu aspek secara terpisah. Oleh karena itu diperlukan kajian literatur lebih lanjut untuk menyatukan temuan-temuan tersebut agar dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai peran pendidikan nasional sebagai suatu sistem yang terpadu.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur. Metode studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelola bahan penelitian (Zed, 2008). Tujuan penggunaan metode studi literatur dalam penelitian ini adalah sebagai langkah awal dalam perencanaan pada penelitian dengan memanfaatkan kepustakaan untuk memperoleh data tanpa perlu terjun secara langsung ke lapangan. Sumber data yang menjadi referensi dalam penelitian ini adalah sumber pustaka yang relevan dan up to date sebagai sumber data primer seperti jurnal ilmiah dan sumber data sekunder (peraturan dasar hukum pemerintah, buku, dll). Setelah memperoleh referensi sebagai sumber data, langkah berikutnya yaitu melakukan analisis data kajian pustaka yang akan dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah dimana peneliti mengupas suatu teks dengan objektif untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi apa adanya, tanpa campur tangan peneliti (Ahmad, 2018). Pada tahap ini peneliti akan membaca dan menelaah setiap sumber untuk mengidentifikasi tema, konsep, atau kategori yang berkaitan dengan pendidikan sebagai suatu sistem dalam perspektif pendidikan nasional. Tahap berikutnya dilakukan pengelompokan data berdasarkan fokus pembahasan atau kesamaan makna, yang kemudian hasil kajian tersebut akan dianalisis dan ditafsirkan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana setiap komponen pendidikan saling berkaitan dan berperan dalam membentuk sistem pendidikan nasional yang utuh.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Sistem

Kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu *systema* yang berarti cara atau strategi. Dalam pengertian umum, sistem merupakan suatu kesatuan kompleks yang terdiri dari elemen-elemen yang saling berinteraksi dan terorganisir secara terstruktur untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Widarti et al., 2024). Hal serupa disampaikan oleh Hidayat & Abdillah (2019) yang menyatakan bahwa sistem merupakan kumpulan dari beberapa elemen yang mempunyai keterkaitan satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sejalan dengan hal itu, Pischetola & De Miranda (2020) menegaskan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang terintegrasi melalui komunikasi sedemikian rupa sehingga, untuk memahami komponen-komponennya, perlu juga memahami cara-cara di mana mereka berhubungan atau berkomunikasi satu sama lain. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan sebuah kumpulan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berinteraksi dan terhubung antara satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu.

Suatu sistem bersifat ganda dan tersusun. Dalam sebuah sistem terdapat sistem lain yang lebih kecil (komponen) dan sistem tersebut menjadi bagian dari sistem yang lebih besar yang disebut subsistem, sedang sistem yang lebih besar di mana subsistem itu berada disebut suprasistem. Sistem bisa dibedakan menjadi sistem tertutup dan sistem terbuka (Fachruddin et al., 2023). Sistem tertutup di dalam proses kerjanya tidak dipengaruhi oleh lingkungannya, sedangkan dalam sistem terbuka proses kegiatannya memperoleh masukan atau berhubungan secara dinamik dengan sistem yang lain diluar lingkungan sistemnya.

Menurut Ratumanan & Rosmiati (2019), terdapat tiga karakteristik penting dari sistem, diantaranya yaitu:

1. Sistem yang terdiri dari sekumpulan komponen. Setiap sistem memiliki komponen-komponen sistem. Setiap komponen sistem memiliki peran tersendiri. Contoh, sepeda motor merupakan sebuah sistem. Terdapat banyak komponen pada sepeda motor, misalnya ban, setir, kopling, rem, dan sebagainya. Semua komponen tersebut memiliki peran masing-masing. Peran tersebut pada umumnya bersifat saling melengkapi, bahkan ada yang merupakan prasyarat dan memberikan stimulus pada komponen lainnya.
2. Interaksi antar komponen dalam sistem. Komponen-komponen dalam sistem saling saling berinteraksi antara satu sama lain, bekerja sama, saling mendukung, dan saling memberikan kontribusi dalam sebuah proses. Tanpa adanya hubungan antar komponen, proses dalam sistem tidak dapat berlangsung secara optimal.
3. Tujuan Sistem. Setiap sistem memiliki tujuan tertentu. Komponen-komponen tersebut bekerja sama dan berperan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau disepakati dalam sistem tersebut.

Lebih lanjut, dalam buku yang sama, mereka juga mengutip pendapat *Banathy* yang menjelaskan bahwa terdapat empat karakteristik penting yang mencerminkan eksistensi sebuah sistem, yaitu:

1. *Independent*. Setiap komponen yang ada dalam suatu sistem saling terkait untuk mencapai tujuan dan kinerja secara keseluruhan. Hasil atau output dari satu komponen dalam sistem akan menjadi masukan bagi komponen-komponen lain dalam sistem tersebut.
2. *Synergistic*. Kinerja keseluruhan komponen dalam suatu sistem akan lebih baik jika dibandingkan kinerja setiap komponen yang bekerja secara masing-masing. Untuk mencapai kinerja terbaik dalam suatu sistem, semua komponen di dalamnya perlu berfungsi secara maksimal.
3. *Dynamic*. Suatu sistem memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Sistem ini menerima input, melakukan proses, dan menghasilkan produk atau output untuk lingkungan sekitarnya. Sistem ini terus berubah secara dinamis sejalan dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya.
4. *Cybernetic*. Setiap komponen dalam suatu sistem akan saling berkomunikasi dengan efisien, ini adalah kondisi penting dalam sistem agar saling bergantung, sinergis, dan dinamis. Karakteristik ini sangat penting karena untuk memahami proses perancangan instruksional dan bagaimana komponen-komponen tersebut dapat berkolaborasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sistem.

Pendidikan Nasional sebagai Suatu Sistem Terpadu

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar serta proses pembelajaran yang mendorong siswa untuk secara aktif mengembangkan potensi mereka. Hal ini bertujuan agar mereka memiliki kekuatan spiritual dalam beragama, kemampuan mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, serta keterampilan yang diperlukan bagi diri mereka sendiri dan masyarakat (Bp et al., 2022). Hal serupa disampaikan juga oleh Purwaningsih et al (2022) yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar untuk memanusiakan manusia, dalam proses pendidikan bukanlah menjadi tugas utama bagi sekolah saja, tetapi semua unsur harus memiliki peran yang sama dalam memajukan pendidikan. Semua unsur harus memiliki andil dan terhubung antar unsur dalam pengembangan lembaga pendidikan atau proses keberlangsungan suatu pendidikan.

Keberadaan satu unsur membutuhkan unsur lainnya. Jika salah satu diantara unsur-unsur itu tidak ada, maka proses pendidikan akan terhambat yang akan mengakibatkan kegagalan pada tujuan pendidikan nasional (Qamar, 2005). Sistem pendidikan bertindak dalam mengolah semua masukan dari masyarakat yang nantinya akan mencetak individu yang terdidik. Individu yang terdidik adalah individu yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan masyarakat dalam berbagai peran, seperti: individu dan anggota yang berdaya, pekerja di sektor ekonomi yang produktif, pemimpin dan pembaharu dalam berbagai bidang, warga negara yang sadar hukum, dsb.

Pendidikan sebagai suatu sistem merupakan pendidikan yang terdiri dari elemen elemen atau unsur-unsur yang di dalamnya saling berkaitan secara fungsional, sehingga terjadinya satu kesatuan yang terpadu dan saling berhubungan, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagai sebuah sistem, pendidikan tidak hanya mencakup proses transfer pengetahuan dari guru ke siswa, tetapi juga melibatkan berbagai komponen yang saling terkait. Komponen-komponen ini berinteraksi di berbagai tingkat pendidikan dan pada skala waktu yang berbeda (Garira, 2024).

Menurut Dahniar (2022) komponen-komponen dalam sistem pendidikan menjalankan peran yang sangat penting dalam mengelola dan membimbing seluruh kompleksitas proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 yang menetapkan bahwa Sistem Pendidikan Nasional terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait secara terpadu, seperti lingkungan, sarana-prasarana, sumber daya, dan masyarakat. Komponen-komponen ini bekerja secara bersama-sama untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Sejalan dengan hal itu, Mudwile & Goswami (2024) menekankan bahwa komponen pendidikan yang bermutu memiliki dampak yang mendalam pada individu, masyarakat, dan ekonomi. Pendidikan yang bermutu memungkinkan individu mencapai potensi maksimal mereka, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan terlibat secara efektif dalam dunia yang terus berkembang pesat. Keseimbangan dan keterkaitan antar komponen tersebut, menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang menyeluruh, di mana setiap bagian memiliki kontribusi yang krusial dalam menentukan keberhasilan dan keberlanjutan proses pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan nasional harus dipandang sebagai suatu sistem yang

utuh dan terorganisasi, yang di dalamnya terdapat hubungan fungsional antar elemen untuk mencapai tujuan bersama.

Landasan Pendidikan Nasional Sebagai Suatu Sistem Terpadu

Pendidikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Secara filosofis, Pancasila memiliki peran yang sangat penting sebagai landasan filosofis pada sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, demokrasi, persatuan, serta keadilan sosial menjadi sandaran pada pembentukan kebijakan dalam dunia pendidikan, pengembangan kurikulum, serta penerapan metode pembelajaran. Nilai Pancasila harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan Pendidikan Nasional dalam semua level dan tingkat dan jenis pendidikan (Junaid, 2012). Sejalan dengan hal tersebut, Mustaqimah et al (2024) menyatakan bahwa Pancasila sebagai Landasan Filosofis Pendidikan Nasional bertujuan untuk membentuk rencana pembelajaran yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila dengan mengimplementasikan Pancasila dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, menurut Tirtarahardja & La Sulo (2008) menegaskan bahwa landasan filosofis Pancasila dalam sistem Pendidikan Nasional menempatkan peserta didik sebagai makhluk yang khas dengan segala fitrahnya dan tugasnya menjadi agen pembangunan yang berharkat dan bermartabat. Pemahaman terhadap landasan ini sangat penting karena berfungsi sebagai acuan untuk mengevaluasi penerapan teori pendidikan yang berhubungan dengan tujuan pendidikan, khususnya terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, landasan filosofis menuntun arah Pendidikan Nasional agar selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Sedangkan secara yuridis, Pendidikan Nasional memiliki dasar hukum yang kuat yang mengatur terkait hak serta kewajiban warga negara dalam bidang pendidikan. Seperti pada Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa *"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan"*, dan pada ayat (2) menegaskan bahwa *"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang"*. Hal ini memberikan arti bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan bagi warga negaranya secara merata. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 3, menyatakan bahwa *"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab"*. Ketentuan tersebut memberikan arah, fungsi dan tujuan yang harus dicapai oleh seluruh sistem pendidikan di Indonesia. Dengan demikian, pendidikan nasional dapat dipahami sebagai suatu sistem terpadu, karena terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

Setelah ditinjau dari aspek filosofis dan yuridis, Pendidikan Nasional juga memiliki landasan sosiologis. Landasan pendidikan sosiologis adalah suatu alat atau pemahaman yang digunakan sebagai dasar studi pendidikan maupun pelaksanaan pendidikan yang mana sumber utamanya adalah sosiologi (Maghfiroh & Rohmah, 2024). Menurut Adib (2024) menyatakan bahwa dasar-dasar sosiologi terdiri dari prinsip-prinsip pendidikan yang berasal dari nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat di suatu negara. Untuk memahami dinamika kehidupan bersama dalam suatu negara, harus memperhatikan dinamika interaksi antar individu dan kelompok di dalamnya. Sebagai hasil dari proses ini, terbentuklah nilai-nilai sosial yang menjadi dasar normatif bagi keseluruhan masyarakat, yang pada akhirnya berfungsi sebagai pengikat bagi semua anggota masyarakat dalam mencapai kehidupan yang harmonis dan damai. Dari ketiga landasan ini (fisiologis, yuridis dan sosiologis), tentunya saling melengkapi antara satu sama lain dan membentuk satu kesatuan sistem yang terpadu dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.

Tantangan dan Upaya Dalam Sistem Pendidikan Nasional

Dalam mengimplementasikan Pendidikan Nasional sebagai suatu sistem, berbagai tantangan kerap dihadapi. Menurut Wahyudi et al. (2025) menyatakan bahwa terdapat beberapa tantangan utama dalam sistem pendidikan di Indonesia, tantangan tersebut diantaranya yaitu ketimpangan akses dan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, keterbatasan infrastruktur, dan distribusi tenaga pendidik yang belum merata. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sukari dan Sugiarti (2024) yang menunjukkan bahwa mutu pengajaran di Indonesia merupakan salah satu masalah penting yang berdampak pada keefektifan sistem pendidikan. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk memperbaiki standar pendidikan, mutu pengajaran di Indonesia masih sangat berbeda-beda, terutama antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, perkembangan teknologi menghadirkan tantangan baru dalam dunia pendidikan, di mana digitalisasi pembelajaran masih mengalami kendala dari segi kesiapan tenaga pengajar dan akses teknologi yang belum merata di seluruh daerah. Kendala lain yang tidak kalah penting adalah kurikulum yang belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dunia kerja juga menjadi permasalahan, di mana banyak lulusan pendidikan formal yang kesulitan beradaptasi dengan tuntutan dunia industri. Disisi lain kualitas guru yang sangat rendah dan gaji/upah yang rendah menjadi tantangan sistem pendidikan saat ini. Kedua faktor ini terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, langsung maupun tidak langsung.

Berangkat dari sejumlah permasalahan di atas, dibutuhkan upaya guna memastikan setiap komponen pendidikan dapat berfungsi secara optimal. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti Merdeka Belajar. Kebijakan “Merdeka Belajar” berindikasi dapat merealisasikan seutuhnya tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 20 Tahun 2003, termasuk di dalamnya perkembangan dan pencapaian tujuan pembelajaran (Marlia, 2024). Selain itu, kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yang diharapkan mampu menciptakan generasi yang berkualitas dan menjamin bahwa generasi

muda mendapatkan pendidikan yang layak (Jumanah & Rosita, 2023; Aziz, 2019). Selain kebijakan Merdeka Belajar dan Program Indonesia Pintar (PIP), pemerintah juga menerapkan Program Guru Penggerak sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang sistem pendidikan nasional. Tujuan program guru penggerak ini, yaitu sebagai seorang yang terlatih untuk menjadi contoh bagi guru lainnya dalam proses pembelajaran (Muslim & Mulloh, 2022). Dengan penerapan kebijakan-kebijakan inilah yang diharapkan mampu meningkatkan sistem pendidikan yang terpadu.

Kesimpulan

Pendidikan Nasional sebagai suatu sistem berperan sebagai pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalamnya terdiri dari elemen atau unsur-unsur yang saling berkaitan secara fungsional, sehingga terjadinya satu kesatuan yang terpadu dan saling berhubungan, dengan harapan dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagai suatu sistem yang kompleks, pendidikan nasional akan berfungsi secara optimal jika semua komponennya saling mendukung antara satu sama lain. Keterpaduan antar komponen inilah yang menjadi dasar dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berkualitas dan merata. Meskipun dalam mengimplementasikan pendidikan sebagai suatu sistem terdapat berbagai tantangan yang kerap dihadapi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pendidikan Indonesia yang berkesinambungan, serta pendekatan yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Daftar Pustaka

- Adib, M. A. (2024). Perspektif Baru Dalam Pendidikan: Landasan Sosiologis Dan Kultural Sebagai Inovasi Edukatif. *SERUMPUN : Journal of Education, Politic, and Social Humaniora*, 2(1), 47-58. <https://doi.org/10.61590/srp.v2i1.114>
- Bp, A. R., et al. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Jurnal Al-Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1-8. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/alurwatul/article/view/7757>
- Dahniar. (2021). Sistem Pendidikan, Pendidikan Sebagai Sistem Dan Komponen Serta Interdependensi Antar Komponen Pendidikan. *Jurnal Literasiologi*. 7(3). <https://doi.org/10.47783/literasiologi.v7i3.322>
- Fachruddin, F., et al. (2023). Klasifikasi Sistem dan Hubungan sebagai Inti dari Sistem. *Jurnal Transformasi Manageria Manajemen Pendidikan Islam*, 3(2), 535-542. <https://doi.org/10.47467/manageria.v3i2.3182>
- Garira, E. (2024). A Systemic Perspective to Realizing and Improving Quality of Education in Schools. *International Journal of Educational Reform*, 0(0). <https://doi.org/10.1177/10567879231222862>
- Habsy, B. A., et al. (2025). Pendidikan Sebagai Sistem. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia*, 2(2), 9-18. <https://doi.org/10.62017/jppi.v2i2.2816>
- Herawati., & Mutiawati. (2019). Dilematika Sistem Pendidikan Di Indonesia. *Journal of Education Science (JES)*, 5(2), 38-53.

- Hidayat, R., & Abdillah. (2019). *Ilmu Pendidikan Konsep, Teori, dan Aplikasinya*. Medan: LPPI.
- Kholik, B., et al. (2025). Evaluasi Program Indonesia Pintar (Pip) Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan Di Sd Negeri 1 Jejawu Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021-2023. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbang*, 12(3), 1-12. <https://doi.org/10.35450/jip.v12i03.631>
- Jumanah & Rosita, H. (2023). Evaluasi Program Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 4(1), 53-66.
- Junaid, H. (2012). Sumber, Azas Dan Landasan Pendidikan. *Sulesana*, 7(2), 84-102.
- Maghfiroh, A., & Rohmah, L. (2024). Analisis Landasan Sosiologi Dalam Pendidikan. *Al-Haytham: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 62-72. <https://journal.staida-sumsel.ac.id/index.php/alhaytham>
- Marlia (2024). PETA JALAN MERDEKA BELAJAR (Korelasi Kebijakan dengan Linguistik dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). *JURNAL WISTARA Jurnal Pendidikan, Bahasa dan Sastra*, 5(1), 23-34. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/wistara/article/view/5264/2224>
- Mduwile, P., & Goswami, D. (2024). Components of a Quality Education: A literature review. *ASIAN: Indonesian Journal of Learning Development and Innovation*, 2(1), 120-130.
- Muslim, A, Q., & Mulloh, T. (2022). Analisis Kebijakan Program Guru Penggerak Sebagai Upaya Regenerasi Supervisor Pendidikan Yang Berkualitas Di Indonesia. *Journal Publicuho*, 5(3), 790-801. [10.35817/publicuho.v5i3.28](https://doi.org/10.35817/publicuho.v5i3.28)
- Mustaqimah, D., et al. (2024). Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Pendidikan Nasional. *COGNITIVE: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2(3).
- Pischetola, M., & De Miranda, L. V. T (2020). Systemic Thinking in Education and a Situated Perspective on Teaching. *Ciência & Educação (Bauru)*, 26. <https://doi.org/10.1590/1516-731320200015>
- Purwaningsih, I., et al. (2022). Pendidikan Sebagai Suatu Sistem. *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan di bidang Administrasi Pendidikan*. 10(2), 21-26. <https://ejournal.undikma.ac.id/index.php/visionary/article/view/5113>
- Ratnaningrum, W. A. (2022). Dasar-Dasar Yuridis Sistem Pendidikan Nasional. *EJT: Educational Technology Journal*, 2(2), 22-28. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/etj>
- Ratumanan, T. G., & Rosmiati, I. (2019). *Perencanaan Pembelajaran*. Depok: Rajawali Pers.
- Ridlwani, A. S. N., & Suparto. (2025). Analisis Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar, Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *QOUBA : Jurnal Pendidikan*, 2(1), 119-126. <https://doi.org/10.61104/qb.v2i1.300>
- Soto, M., et al. (2025). IMF engagement on education spending in surveillance and program work. *International Monetary Fund*. <https://www.elibrary.imf.org>
- Sukari, S., & Sugiarti, S. (2024). Mengidentifikasi Isu-Isu Pendidikan Di Indonesia Dan Solusinya. *TSAQOFAH*, 4(6), 3855-3864. <https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v4i6.3869>

- Suryani, M. (2023). Hakekat Pendidikan dalam Kehidupan Manusia (Studi Analisis Empiris Perilaku Masyarakat). *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*. 3(3), 537-544. <https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i03.3397>
- Tirtarahardja, U., & La Solo, L. S. (2008). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Wahyudi, M., et al. (2025). The Complexity of the National Education System: Challenges and Strategies for Transforming the Education System, 3(1), 39-46. <https://doi.org/10.59890/ijasse.v3i1.271>
- Widiarti, E., et al. (2024). *Buku Ajar Pengantar Sistem Informasi*. Jambi: PT. Sonpedia Penerbitan Indonesia.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor.